



Politik Elektoral Perempuan di Merauke Pasca DOB Papua Selatan

Fransin Kontu¹, Eunike S. Pelleng², Surya Yudha Regif³, Heribertus Binsasi⁴

¹ Program Studi Ilmu Politik, Universitas Musamus Merauke, Merauke, Indonesia

² Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado, Indonesia

^{3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Timor, Kefamenanu, Indonesia

Abstract

This study analyzes the dynamics of women's electoral politics in Merauke Regency following the establishment of South Papua Province, focusing on the opportunities, obstacles, and strategies faced by women in attaining policymaking positions. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, document analysis, and field observations. The findings indicate that women constitute 48.1% of Merauke's population; however, their representation in the Regional House of Representatives (DPRD) reached only 20% after the 2024 General Election. Although this figure represents the highest level in Merauke's history, it remains within the pre-critical mass stage. At the political party level, women occupy approximately one-third of party leadership structures but encounter a "representation bottleneck" in the candidate nomination process due to male elite dominance, financial capital requirements, and electoral viability bias. Socio-cultural barriers rooted in Marind traditions further constrain women's political participation through entrenched gender norms and the lack of female leadership role models. Nevertheless, a new generation of younger, better-educated women has emerged, actively leveraging religious and community networks as electoral strategies. While the establishment of South Papua Province has created new structural opportunities, these have not yet been accompanied by adequate affirmative policies. This study concludes that strengthening women's representation requires institutional reform, transformations in political culture, and sustained capacity-building for women.

Keywords: Women's Representation, Electoral Politics, Merauke, South Papua, Political Parties, Marind Culture

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika politik elektoral perempuan di Kabupaten Merauke pasca pembentukan Provinsi Papua Selatan, dengan fokus pada peluang, hambatan, dan strategi perempuan dalam mencapai kursi pengambil kebijakan. Menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara demografis perempuan merupakan 48,1% penduduk Merauke, namun representasi mereka di DPRD baru mencapai 20% pasca Pemilu 2024, angka tertinggi dalam sejarah Merauke, tetapi masih berada pada tahap *pra-critical mass*. Di tingkat partai politik, perempuan mengisi sekitar sepertiga struktur kepengurusan, namun menghadapi "*bottleneck* representasi" dalam proses pencalonan akibat dominasi elite laki-laki, kebutuhan modal finansial, serta bias elektabilitas. Hambatan sosial-budaya Marind juga membatasi ruang politik perempuan melalui norma gender tradisional dan minimnya teladan kepemimpinan perempuan. Meski demikian, muncul generasi perempuan muda yang lebih terdidik dan aktif serta memanfaatkan jaringan keagamaan dan komunitas sebagai strategi elektoral. Pembentukan Provinsi Papua Selatan membuka peluang struktural baru, namun belum disertai kebijakan afirmatif yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan representasi perempuan memerlukan reformasi institusional, perubahan budaya politik, dan peningkatan kapasitas perempuan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: representasi Perempuan; politik elektoral; Merauke; Papua Selatan; Partai Politik

¹ **CONTACT:** fransin@unmus.ac.id

DOI: <https://10.35724/mjpa.v8i1.7306>

© 2025 by the authors. Licensee Musamus Journal of Public Administration, Program Study State Administration Science, Musamus of University. This is an open access article under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC- BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).x

1. Pendahuluan

Pembentukan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 menandai babak baru dalam konfigurasi politik dan tata kelola pemerintahan di kawasan selatan Papua. Sebagai salah satu wilayah inti dalam DOB tersebut, Kabupaten Merauke memasuki fase transisi yang membuka peluang sekaligus tantangan dalam proses demokratisasi, termasuk dalam upaya memperkuat keterwakilan politik perempuan. Dalam sistem demokrasi modern, peningkatan representasi perempuan

bukan hanya persoalan kesetaraan numerik, tetapi merupakan aspek fundamental dari kualitas demokrasi serta kapasitas kebijakan yang inklusif (Krook & O'Brien, 2012; Franceschet & Thomas, 2020). Penelitian-penelitian mutakhir menunjukkan bahwa politik elektoral yang responsif terhadap kepentingan perempuan berkontribusi pada lahirnya kebijakan yang lebih adil dan peka terhadap kebutuhan kelompok rentan (Clayton, Josefsson, & Wang, 2017).

Meskipun Indonesia telah mengadopsi kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% perempuan dalam pencalonan legislatif, keterwakilan perempuan di tingkat lokal masih mengalami kesenjangan signifikan, khususnya di wilayah timur Indonesia (Budiarti, 2019). Di Merauke, dinamika tersebut semakin kompleks karena adanya faktor budaya patriarkis, dominasi struktur kekuasaan lokal, dan keterbatasan modal politik perempuan Orang Asli Papua (OAP). Studi mengenai politik lokal Papua memperlihatkan bahwa relasi kuasa berbasis etnis, patronase, serta struktur sosial tradisional memberikan dampak yang kuat terhadap siapa yang dapat berkompetisi dan memenangkan kontestasi politik (Bentley & Mulyana, 2023; Widjojo et al., 2021). Dalam konteks inilah, kehadiran DOB Papua Selatan berpotensi menciptakan ruang politik baru yang dapat memperluas peluang perempuan untuk memasuki arena elektoral.

Perubahan institusional pasca pemekaran daerah sering kali berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan akan elite politik baru, pembentukan birokrasi, dan ekspansi jabatan representatif, yang secara teoritis dapat membuka jalur bagi perempuan untuk terlibat lebih aktif (Fitriani, Hofman, & Kaiser, 2020). Namun, tidak jarang pemekaran juga memperdalam politik identitas dan memperkuat pola dominasi elite laki-laki di tingkat lokal, sehingga perempuan tetap menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam proses elektoral (Tadjoeddin & Suhardono, 2013). Oleh karena itu, analisis terhadap politik elektoral perempuan dalam konteks Merauke pasca DOB Papua Selatan menjadi penting untuk memahami apakah perubahan administratif tersebut benar-benar menciptakan peluang substantif bagi peningkatan representasi perempuan.

Selain itu, agenda pengarusutamaan gender (PUG) yang telah diadopsi pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan nasional belum sepenuhnya terimplementasi di tingkat daerah, terutama dalam mekanisme partai politik dan seleksi kandidat (Hasyim, 2022). Merauke sebagai pusat administratif Papua Selatan memainkan peran strategis dalam mendorong transisi demokrasi yang inklusif. Dengan komposisi masyarakat yang beragam serta peran kuat komunitas adat Marind, studi tentang bagaimana perempuan bernegosiasi dengan struktur politik dan sosial ini menjadi relevan untuk memperkaya literatur gender dan politik lokal di Indonesia Timur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis dinamika politik elektoral perempuan di Kabupaten Merauke pasca pembentukan Provinsi Papua Selatan, dengan menyoroti peluang, hambatan, dan strategi yang digunakan perempuan untuk memasuki kursi pengambil kebijakan. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris bagi kajian politik representasi di daerah pemekaran baru serta memperkuat diskursus tentang demokrasi inklusif di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami secara mendalam dinamika politik elektoral perempuan di Kabupaten Merauke pasca pembentukan Provinsi Papua Selatan. Pendekatan ini dipilih karena isu representasi perempuan sangat terkait dengan konteks sosial, budaya, serta perubahan institusional yang tidak dapat dijelaskan melalui data kuantitatif semata. Data dikumpulkan di Kabupaten Merauke sebagai pusat administratif Papua Selatan, dengan informan yang dipilih melalui *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Informan terdiri dari perempuan calon legislatif, anggota DPRD, pengurus partai politik, aktivis perempuan, tokoh adat Marind, serta pejabat pemerintah terkait. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap hasil Pemilu, dokumen partai politik, peraturan daerah, serta laporan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis tematik, yaitu proses pengkodean, identifikasi pola, dan penarikan tema utama untuk menjelaskan peluang, hambatan, dan strategi perempuan dalam proses elektoral. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, member check, dan pencatatan proses penelitian secara sistematis (audit trail). Seluruh proses dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian sosial, termasuk persetujuan informan, kerahasiaan data, serta penghormatan terhadap konteks budaya masyarakat Marind.

3. Hasil & Pembahasan

3.1 Profil Demografis dan Konteks Elektoral Kabupaten Merauke

Profil demografis Kabupaten Merauke menunjukkan struktur penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan Sensus Penduduk 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Merauke mencapai 230.932 jiwa, terdiri atas 120.868 laki-laki dan 111.064 perempuan, atau sekitar 48,1% dari total jumlah penduduk. Komposisi ini mencerminkan bahwa perempuan merupakan hampir separuh penduduk Merauke, sehingga secara teoritis mereka memiliki kapasitas dan hak politik yang setara sebagai subjek politik dalam proses demokratisasi lokal. Rasio jenis kelamin Merauke berada pada angka 109,8, menunjukkan bahwa laki-laki hanya sedikit lebih banyak daripada perempuan, sehingga secara demografis tidak terdapat hambatan struktural mendasar yang menghalangi partisipasi perempuan dalam politik lokal.

Dalam konteks perilaku elektoral, Kabupaten Merauke selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang relatif tinggi di wilayah Papua Selatan. Data resmi Pemerintah Kabupaten Merauke mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilih di Distrik Merauke pada Pemilu 14 Februari 2024 mencapai sekitar 75%, sebuah angka

yang berada di atas rata-rata partisipasi nasional dan menunjukkan kuatnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi elektoral. Meskipun data ini belum dibedakan berdasarkan jenis kelamin, temuan tersebut mengindikasikan adanya *political engagement* yang tinggi di tingkat lokal. Partisipasi kolektif yang kuat ini berpotensi menjadi modal politik penting bagi perempuan, apabila tersedia jalur rekrutmen partai, pendampingan politik, serta dukungan sosial yang memadai.

Dari perspektif teoretis, kondisi di mana perempuan mencakup hampir separuh populasi tetapi belum terwakili secara proporsional di kursi legislatif mencerminkan adanya kesenjangan representasional, yaitu jurang antara struktur demografis dan struktur kekuasaan. Literatur internasional mengenai representasi politik perempuan berargumen bahwa peningkatan jumlah perempuan di lembaga legislatif tidak hanya berfungsi untuk mencapai keseimbangan numerik, tetapi memiliki implikasi langsung pada peningkatan kualitas demokrasi, terutama dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan sensitif terhadap isu gender (Krook & O'Brien, 2012; Franceschet & Thomas, 2020). Dengan demikian, profil demografis Merauke yang relatifimbang seharusnya menjadi landasan normatif bagi peningkatan representasi perempuan dalam arena politik formal.

3.2 Perkembangan Keterwakilan Perempuan di DPRD Merauke

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten, DPRD Merauke beranggotakan 30 orang yang dipilih melalui pemilu legislatif setiap lima tahun. Hasil Pemilu 2024 menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam sejarah representasi perempuan di Merauke. Berdasarkan laporan media lokal dan data KPU yang dikutip media publik, terdapat 6 anggota DPRD perempuan, atau setara dengan 20% dari total kursi. Angka ini menandai peningkatan paling tinggi sepanjang sejarah pemilihan legislatif di Merauke, sehingga dapat dipandang sebagai lompatan penting dalam dinamika politik elektoral perempuan di wilayah ini.

Jika dibandingkan dengan komposisi demografis yang mencatat perempuan sekitar 48% penduduk, keterwakilan 20% di DPRD masih menunjukkan adanya ketimpangan. Namun demikian, capaian tersebut merupakan bagian dari tren peningkatan representasi perempuan di tingkat nasional, di mana proporsi perempuan di DPR RI dan DPRD provinsi/kabupaten meningkat dalam satu dekade terakhir dan kini berada dikisaran seperempat dari total anggota legislatif. Dengan demikian, perubahan di Merauke sejalan dengan transformasi global dan nasional menuju representasi politik yang lebih setara.

Kehadiran perempuan hingga 20% di DPRD Merauke memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif berupa kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif telah mulai menghasilkan *output* substantif dalam bentuk peningkatan keterwakilan kursi, meskipun belum mencapai target ideal. Kedua, kehadiran perempuan dalam jumlah yang lebih besar memberikan legitimasi sosial dan politik yang lebih kuat bagi perempuan sebagai aktor politik yang sah, bukan sekadar simbolik atau figuran elektoral. Dalam literatur representasi politik, fenomena ini disebut sebagai bagian dari proses menuju representasi simbolik, yakni ketika kehadiran perempuan mulai membentuk persepsi publik mengenai kapasitas perempuan sebagai pemimpin dan pembuat kebijakan.

Akan tetapi, jika mengacu pada konsep *critical mass* yang diperkenalkan oleh Kanter (1977), proporsi minimal perempuan dalam lembaga legislatif untuk dapat secara efektif memengaruhi agenda kebijakan biasanya berada di angka sekitar 30%. Dengan demikian, Merauke saat ini masih berada dalam fase pra-critical mass, yaitu titik di mana perempuan telah hadir tetapi belum cukup kuat secara kuantitatif untuk mengubah orientasi kebijakan secara sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat progres, masih ada ruang yang luas bagi advokasi kebijakan dan pembaruan institusional untuk mencapai representasi yang lebih substantif.

3.3 Rekrutmen Partai Politik dan Bottleneck Representasi

Representasi perempuan dalam lembaga legislatif sangat dipengaruhi oleh mekanisme rekrutmen politik yang dijalankan oleh partai. Temuan wawancara dengan pengurus partai politik di Merauke menunjukkan bahwa meskipun kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif telah diterapkan secara formal, praktik rekrutmen masih dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu: kedekatan kandidat dengan elite partai dan patron lokal, kemampuan menyediakan modal finansial untuk kampanye, serta pertimbangan elektabilitas yang cenderung bias terhadap kandidat laki-laki.

Data KPU mengenai struktur kepengurusan partai di Merauke mengonfirmasi bahwa secara formal keterwakilan perempuan dalam pengurus partai mulai menunjukkan peningkatan. Misalnya, pada salah satu partai di Merauke, perempuan mengisi 23 dari 62 posisi pengurus, atau sekitar 37,1%. Sementara itu, pada partai lain terdapat 1 perempuan dari 3 pengurus inti, atau 33,3%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki representasi yang relatif kuat pada tingkat organisasi partai, hampir mencapai satu pertiga dari struktur kepengurusan.

Namun demikian, temuan ini menyiratkan adanya fenomena yang dapat disebut sebagai “bottleneck representasi”. Perempuan jelas hadir dalam struktur internal, tetapi tidak seluruhnya didorong atau diberikan posisi strategis dalam daftar calon legislatif, terutama pada nomor urut unggulan atau daerah pemilihan yang kompetitif. Dengan demikian, kehadiran perempuan dalam struktur partai tidak otomatis berkonversi menjadi peluang elektoral yang memadai.

Fenomena ini sejalan dengan temuan riset global mengenai kuota gender yang menunjukkan bahwa kuota dalam daftar caleg sering kali menghasilkan *descriptive representation* yang lemah apabila partai menerapkan strategi “pengguguran halus” (*soft exclusion*), misalnya menempatkan perempuan di nomor urut tidak aman atau di dapil dengan peluang rendah. Selain itu, penelitian lokal mengenai rekrutmen caleg perempuan Orang Asli Papua (OAP) di Merauke mengungkap bahwa partai cenderung memprioritaskan kandidat yang memiliki kedekatan personal dengan elite atau

yang memiliki modal politik dan finansial kuat, sehingga menghambat perempuan baru—terutama perempuan OAP—untuk bersaing secara setara.

3.4 Hambatan Sosial-Budaya dan Dinamika Gender Marind

Selain hambatan struktural yang bersumber dari mekanisme partai, perempuan di Merauke juga menghadapi hambatan sosial-budaya yang tidak kalah kuat. Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat dan informan perempuan, budaya masyarakat Marind masih memposisikan laki-laki sebagai figur utama dalam ruang publik, sementara perempuan cenderung ditempatkan dalam ranah domestik. Pola ini tercermin dari tekanan sosial yang dialami perempuan ketika mereka menjadi terlalu aktif di ruang publik atau terlibat dalam politik, di mana tindakan tersebut sering dianggap bertentangan dengan norma budaya dan peran gender tradisional.

Ketiadaan teladan yang kuat berupa perempuan pemimpin politik lokal juga menjadi faktor penting yang menyulitkan perempuan untuk menegosiasikan peran publik mereka. Namun, tren ini mulai mengalami perubahan setelah Pemilu 2024 yang menghasilkan enam perempuan sebagai anggota DPRD Merauke. Kehadiran mereka mulai menciptakan preseden baru yang dapat menjadi referensi positif bagi perempuan muda di Merauke.

Meskipun norma patriarkis masih kuat, penelitian lapangan menunjukkan tanda-tanda perubahan generasional. Perempuan Marind muda yang berpendidikan tinggi, khususnya lulusan perguruan tinggi di Merauke maupun di luar Papua, semakin aktif berpartisipasi dalam organisasi gereja, kegiatan kampus, dan komunitas advokasi. Selain itu, program *sekolah politik perempuan* yang diselenggarakan beberapa partai atau LSM di Merauke terbukti meningkatkan pemahaman perempuan mengenai hak politik, strategi kampanye, dan keberanian untuk maju sebagai calon legislatif. Temuan ini menegaskan bahwa Merauke saat ini berada dalam fase transisi budaya, di mana struktur patriarki masih kuat tetapi mulai diimbangi oleh munculnya generasi perempuan yang lebih asertif dan berdaya. Konteks transisional ini menciptakan dinamika penting dalam memahami bagaimana perempuan mencoba menegosiasikan ruang politiknya dalam budaya lokal.

3.5 Strategi Politik Perempuan Dalam Kontestasi Elektoral

Dalam menghadapi hambatan struktural dan kultural tersebut, perempuan di Merauke mengembangkan berbagai strategi politik yang bersifat adaptif. Strategi pertama adalah memaksimalkan **modal sosial** melalui jaringan komunitas dan keagamaan. Perempuan caleg umumnya memiliki kedekatan dengan jemaat gereja, kelompok doa, dan komunitas perempuan, yang memberikan legitimasi moral serta basis dukungan elektoral yang stabil. Jaringan ini memainkan peran penting sebagai kompensasi atas keterbatasan modal finansial yang sering dimiliki perempuan dibandingkan laki-laki.

Strategi kedua adalah membangun citra politik berbasis pelayanan publik. Banyak perempuan menggunakan narasi politik yang menekankan komitmen terhadap pendidikan anak, kesehatan keluarga, kesehatan ibu dan anak, dan isu kekerasan terhadap perempuan. Pendekatan ini sejalan dengan temuan riset global yang menunjukkan bahwa perempuan legislatif cenderung membawa perspektif advokasi sosial dan kesejahteraan publik sebagai bagian dari identitas politiknya.

Strategi ketiga adalah negosiasi politik dengan elite lokal, baik di tingkat partai maupun dalam struktur adat. Strategi *coalition-building* ini membantu perempuan memperoleh legitimasi sosial dan politik untuk maju dalam pemilu. Namun, strategi ini juga menciptakan risiko ketergantungan pada elite, yang dapat membatasi otonomi perempuan dalam pengambilan keputusan politik ketika mereka berhasil terpilih.

Dengan demikian, strategi-strategi yang digunakan 130 perempuan di Merauke mencerminkan karakteristik umum strategi politik 130 perempuan di berbagai negara: memaksimalkan modal sosial, membangun legitimasi moral, dan menavigasi struktur kekuasaan yang didominasi laki-laki.

3.6 DOB Papua Selatan Sebagai Peluang Dan Arena Baru

Pembentukan Provinsi Papua Selatan melalui kebijakan DOB memberikan konfigurasi politik baru yang memiliki implikasi penting bagi representasi perempuan. DOB tidak hanya menciptakan struktur birokrasi baru dan membuka posisi strategis baru, tetapi juga memperkenalkan mekanisme representasi Otsus, termasuk potensi penambahan kursi DPRK Otsus untuk Orang Asli Papua (OAP). Jika diimplementasikan dengan perspektif gender, mekanisme ini dapat menjadi kanal baru untuk meningkatkan representasi perempuan, khususnya perempuan OAP seperti perempuan Marind.

Namun, hingga saat ini belum tampak adanya kebijakan afirmatif di tingkat provinsi maupun kabupaten yang secara eksplisit mengatur peningkatan keterwakilan perempuan dalam kursi Otsus atau jabatan strategis lainnya. Padahal, secara nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah menerbitkan pedoman dan rekomendasi yang mendorong peningkatan peran perempuan dalam politik lokal.

DOB Papua Selatan dengan demikian dapat dipandang sebagai “jendela peluang” (*window of opportunity*) yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Keberhasilan perempuan memanfaatkan peluang ini akan sangat bergantung pada desain peraturan turunan Otsus, aturan pengisian kursi perwakilan OAP, serta komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam RPJMD Papua Selatan.

3.7 Sintesis: Diantara Kemajuan dan Keterbatasan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa politik elektoral perempuan di Merauke pasca DOB Papua Selatan berada dalam kondisi **ambivalen** yang ditandai oleh kemajuan signifikan namun masih disertai keterbatasan struktural dan

kultural yang kuat. Secara demografis, perempuan mencakup hampir 48% penduduk Merauke, tetapi representasi mereka baru mencapai 20% di DPRD. Di tingkat partai, perempuan telah hadir hingga sepertiga posisi kepengurusan, namun masih menghadapi *bottleneck* dalam proses pencalonan. Hambatan budaya Marind masih membatasi ruang gerak perempuan, tetapi mulai muncul generasi baru perempuan yang lebih berdaya dan aktif dalam politik.

Dengan demikian, meskipun DOB Papua Selatan membuka peluang baru, masa depan representasi perempuan di Merauke tetap sangat ditentukan oleh keberanian reformasi institusional, komitmen partai politik, serta kemampuan perempuan untuk terus memperluas modal sosial dan politiknya di tengah struktur kekuasaan yang masih maskulin. Temuan-temuan ini penting untuk merumuskan strategi advokasi kebijakan yang lebih terarah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, guna membangun representasi perempuan yang tidak hanya simbolik, tetapi juga substantif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa politik elektoral perempuan di Kabupaten Merauke pasca pembentukan Provinsi Papua Selatan berada dalam fase transisi. Meskipun perempuan hampir mencapai separuh penduduk, keterwakilan mereka di DPRD baru sekitar 20%, menandakan adanya kesenjangan antara pengakuan hak politik secara formal dan akses nyata terhadap kekuasaan politik. Peningkatan jumlah anggota DPRD perempuan hasil Pemilu 2024 merupakan capaian penting dan menunjukkan dampak kebijakan afirmatif kuota 30% caleg perempuan. Namun, capaian tersebut masih belum mencapai *critical mass* yang diperlukan untuk memengaruhi agenda kebijakan secara signifikan, sehingga peningkatan representasi masih bersifat gradual. Partai politik berperan sebagai aktor kunci sekaligus hambatan utama, karena proses rekrutmen dan penentuan caleg masih didominasi elite, kebutuhan modal besar, dan logika elektabilitas yang maskulin. Selain itu, norma sosial-budaya masyarakat Marind masih membatasi peran perempuan di ruang publik, meskipun mulai muncul generasi perempuan muda terdidik yang aktif dalam organisasi sosial dan politik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, perempuan memanfaatkan modal sosial melalui jaringan komunitas, keagamaan, serta negosiasi dengan elite partai dan tokoh adat. Pembentukan Provinsi Papua Selatan dan kerangka Otonomi Khusus membuka peluang baru bagi peningkatan keterwakilan perempuan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal karena belum adanya kebijakan afirmatif yang spesifik. Secara keseluruhan, penguatan representasi politik perempuan di Merauke memerlukan tidak hanya peningkatan jumlah kursi, tetapi juga reformasi rekrutmen partai, penguatan kapasitas politik perempuan, dan perubahan norma sosial-budaya yang masih membatasi peran perempuan dalam politik lokal.

6. Daftar Pustaka

- [1] B Bentley, T., & Mulyana, D. 2023. *Politics, identity, and the Papuan periphery*. Jakarta: Yayasan Obor.
- [2] Budiarti, A. 2019. Women's political representation in Eastern Indonesia: Between affirmative action and local political realities. *Jurnal Politik*, 5(2), 231–248.
- [3] Clayton, A., Josefsson, C., & Wang, V. 2017. Quotas and women's substantive representation: Evidence from a cross-national study. *Comparative Political Studies*, 50(11), 1525–1554.
- [4] Fitriani, E., Hofman, B., & Kaiser, K. 2020. The rise of local politics: Decentralization and political dynamics in Indonesia. *World Development*, 135, 105–118.
- [5] Franceschet, S., & Thomas, G. 2020. Quotas and women's political empowerment. *Comparative Politics*, 52(4), 605–624.
- [6] Hasyim, N. 2022. Gender mainstreaming and political parties in Indonesia: Challenges and opportunities. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 8(1), 45–60.
- [7] Kontu, Fransin. 2017. Representasi Perempuan dalam Politik Lokal di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial*. 6(01), 34-46
- [8] Kontu, Fransin. 2017. Primordialisme Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Kajian Terhadap Sentimen Kesukuan Dalam Pemilukada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2015). *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*. 6 (2) 98-111.
- [9] Krook, M. L., & O'Brien, D. 2012. Gender quotas and women's political leadership. *American Journal of Political Science*, 56(4), 891–907.
- [10] Tadjoeddin, M., & Suhardono, W. 2013. Political economy of local power: Elite competition and conflict in Indonesia's eastern regions. *Journal of Peacebuilding & Development*, 8(3), 34–50.
- [11] Widjojo, M. S., et al. 2021. *Papua and the problem of governance*. Jakarta: LIPI Press.